**IMPLEMENTASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH (DPT) DALAM PEMILU KEPALA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN 2010
(STUDI KASUS KELURAHAN PUSAT PASAR
KECAMATAN MEDAN KOTA KOTA MEDAN)**

David Susanto

Jl. T. Anafiah No. 1 Program Magister Studi Pembangunan

Universitas Sumatera Utara

Email: David@student.usu.ac.id

Diterima 22 Januari 2013/ Disetujui 29 Januari 2013

Abstract

The successful implementation of the policy will be determined by many variables or factors, and each of these variables are related to one another. In view of Edwards III, policy implementation is influenced by four variables, namely: (1) communication, (2) resources, (3) disposition, and (4) bureaucratic structure. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results are as follows: (1). Implementation of the discussion using the theory of policy implementation at the stage of monitoring the implementation of data updating voters (DPT) in the city of Medan in 2010 Election not running optimally be seen from the number of people who are not enrolled in the DPT and the limited performance of the Supervisory Committee (2). Inhibiting factors that affect the performance of the Supervisory Committee of Medan in 2010 is a limited member of the Supervisory Committee, the limited time of the establishment (regulation / legislation governing the Supervisory Committee / Election Supervisory Body), HR is not the same (level of education) between Panwas City, District, and Village

Keywords: Implementation, Phase-Phase Election,

Abstrak

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empatvariabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) strukturbirokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: (1). Implementasi pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan mengenai implementasi pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) pada Pemilukada Kota Medan tahun 2010 belum berjalan maksimal dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan kinerja Panwaslu. (2). Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kota Medan Tahun 2010 adalah terbatasnya anggota Panwas, terbatasnya waktu pembentukan (regulasi/UU yang mengatur Panwas/ Bawaslu), SDM yang tidak sama (tingkat pendidikan) antara Panwas Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.

Kata Kunci: Implementasi, Tahapan –Tahapan Pemilukada,

PENDAHULUAN

Manifestasi dari kedaulatan rakyat dapat dilihat dari partisipasi rakyat dalam pemilihan umum dan

keterlibatan dalam partai politik. Adanya partai politik, maka dengan sendirinya pasti ada pemilihan umum baik pemilihan umum legislatif,

pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum kepala daerah/pilkada.

Pilkada sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004) yang kemudian untuk Pilkadanya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.

Khusus berkaitan dengan penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 (UU No.22/2007). Keberhasilan penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia, sangat tergantung pada kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan Pilkada.

Pengaturan yang berkaitan dengan pilkada langsung di Indonesia, terdapat dua regulasi yang secara khusus membahas tentang eksistensi pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada diantaranya UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Tugas dan Kewenangan Panwaslu dalam UU No. 32/ 2004 diatur dalam Pasal 66 ayat (4) huruf (a) sampai (e), merupakan acuan Panwaslu dalam mengawasi pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan sebelum tahun 2007. Sedangkan Pilkada yang diselenggarakan setelah tahun 2007 menggunakan UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia. Pengawas

Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1955 sama sekali tidak mengenal lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas pemilu baru muncul pada Pemilu 1982. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspons pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas'. (sejarah panwaslu/bawaslu.go.id)

Dengan struktur, fungsi, dan mekanisme kerja yang baru, pengawas pemilu tetap diaktifkan untuk Pemilu 1999. Namanya pun diubah dari Panitia Pengawas Pelaksana Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Perubahan terhadap pengawas pemilu baru dilakukan lewat UU No. 12/2003. UU No. 12/2003 menegaskan, untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 (Pasal 74) mengamanatkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dalam tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu termasuk Pemilu Kadal 2010 untuk menindaklanjuti seluruh temuan atau laporan pelanggaran dalam seluruh tahapan Pemilu. Seluruh pelanggaran dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu wajib direkomendasikan oleh Bawaslu

ke pihak terkait yang menjadi penerusan rekomendasi Bawaslu tersebut, yakni: pelanggaran pidana ke polisi, pelanggaran administrasi dan Kode Etik kepada KPU, dan sengketa diselesaikan oleh Panwaslu. Salah satu tahapan lain terkait pelanggaran yakni sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi walaupun bukan kewenangan Pengawas Pemilu, sangat terlihat bahwa peran Pengawas Pemilu menjadi sangat menentukan dalam memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa dimaksud.

Dari 244 Penyelenggaraan Pemilu Kada selama tahun 2010, Bawaslu mendapatkan laporan pelanggaran dari Pengawas Pemilu di 154 Kabupaten Kota dan 7 Provinsi (Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara). Pelanggaran terbesar adalah menyangkut laporan pelanggaran administrasi jumlah total sebesar 1.179 pelanggaran diikuti laporan pelanggaran pidana jumlah total sebesar 572 pelanggaran, dan kemudian laporan pelanggaran Kode etik oleh Penyelenggara Pemilu jumlah total sebesar 16 pelanggaran sehingga total jumlah keseluruhan laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu sebesar 1.767 pelanggaran (Laporan Bawaslu 2010).

Lemahnya pengawasan bukan karena pengawas Pemilu mau enaknya saja atau tinggal diam. Proses pengawasan tahapan penetapan daftar pemilih memiliki 10 tahapan, dimulai dari ketentuan siapa pemilih, sumber data berasal dari pemilu terakhir, pemutakhiran data/daftar pemilih dalam jangka waktu sebulan, disusul dengan daftar pemilih tambahan, daftar pemilih tetap, rekapitulasi daftar pemilih tetap, rekapitulasi jumlah pemilih, distribusi kartu pemilih, perubahan daftar pemilih tetap, dan ketentuan pidana.

Jumlah pengawas pemilu tergolong sedikit, ditambah sarana prasarana yang kurang memadai. Akibatnya pelaku kejahatan dalam pemilu dengan leluasa memanfaatkan kelemahan itu. Kondisi tersebut tidak menjamin suara rakyat sampai pada sistem politik. Kalau suara rakyat tidak terjamin pada sistem politik, maka kualitas demokrasi dalam pemilu kepala daerah juga dapat dipersoalkan.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, pengawas Pemilu Lapangan. Pengawas di semua tingkatan ini tidak menjamin pengawasan telah dilaksanakan dengan baik menyebabkan hasil Pemilu selalu digugat pasangan calon Kada yang kalah ke Mahkamah Konstitusi.

Banyaknya kasus yang terjadi pada Pemilukada Kota Medan tahun 2010 yang lalu sehingga terjadi gugatan yang dilakukan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kota Medan tahun 2010 yang tentunya tidak lepas dari pengawasan yang dilaksanaka Panitia Pengawasan Pemilukada Kota Medan tahun 2010, kemudian rendahnya tingkat partisipasi masyarakat khususnya etnis Tionghua di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan menimbulkan satu fenomena yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimanakah implementasi kalender pengawasan yang dilakukan terutama dalam pemutakhiran data pemilih (DPT) dan bagaimana strategi yang dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya etnis Tionghua dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu Implementasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

(Dpt) Dalam Pemilu Kepala Daerah Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian 14 orang dan narasumber penelitian adalah Mantan Ketua Panwaslu Kota Medan atau mantan anggota Panwaslu Kota Medan, Ketua KPUD Kota Medan atau anggota KPUD Kota Medan dan Pengamat politik Kota Medan yang diwakili dari praktisi politik dan juga dari akademisi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

TELAAH PUSTAKA

Konsep Implementasi

Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan komite sekolah untuk mengubah metode pengajaran guru dikelas. Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Pelaksanaan suatu kebijakan, menurut Grindle (1980:8-12) sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan. Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang akan diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para

implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat

karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pengertian Administrasi

Dari segi etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad (intensif)* dan *ministrare (to serve)* yang berarti melayani. Akhirnya diartikan melayani dengan baik. Administrasi sendiri dilihat dari 2 sudut pandang, yakni:

1. Administrasi dalam arti sempit
Secara sempit, administrasi berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan/ kesekretarian. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya.
2. Administrasi dalam arti luas
Secara luas, administrasi merupakan proses kerjasama beberapa

individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, administrasi dipandang dari 3 sudut pengertian yakni:

- a. Sudut proses
Administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, sampai pelaksanaan kerja hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai.
- b. Sudut fungsi
Administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu maupun individu itu sendiri, sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya, misalnya: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan sebagainya.
- c. Sudut Institusional
Administrasi merupakan personil-personil baik individu maupun sekelompok individu yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Pengertian Pengawasan

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan". Sedangkan menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Sedangkan menurut Komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Panwaslu Provinsi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
 4. Penetapan calon gubernur;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- B. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
- C. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- E. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- F. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
- G. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- H. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi dapat :

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara

dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Panwaslu Provinsi berkewajiban :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi; dan
6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :

- A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;

3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
 4. Penetapan calon bupati/walikota;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- C. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- E. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- F. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
- G. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- H. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- I. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

1. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
2. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan

6. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah :

- A. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pelaksanaan kampanye;
 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 5. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- C. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- D. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- E. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
- F. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan
- G. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan berkewajiban :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

2. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;
3. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah :

- A. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:
 1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. Pelaksanaan kampanye;
 3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- B. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- C. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- D. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- E. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- F. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- G. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban :

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewangnya;
2. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
3. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
4. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

PEMBAHASAN

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada

pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010, telah dilakukan oleh instansi penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Medan, kemudian tugas dan wewenang Panwaslu dalam mengkomunikasikan pemutakhiran data pemilih ini adalah dengan cara berkordinasi dengan instansi terkait antara lain adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Pemko Medan melalui 21 kecamatan yang ada di kota medan dan 152 Kelurahan yang ada di Kota Medan beserta setiap Kepala Lingkungan yang ada di kelurahan masing-masing, komunikasi yang dibangun jelas, dan dua arah maksudnya adalah komunikasi yang baik antara pihak Panwaslu sebagai petugas yang berwenang dalam tahapan-tahapan Pemilu Kota Medan dengan instansi yang terkait saling berkomunikasi dan berkordinasi dengan baik.

Kenyataan dilapangan menunjukkan masih banyak masyarakat di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota yang tidak mendapatkan hak memilih karena tidak terdaftar di DPT, hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian tabel 4.5. Tabel tersebut menunjukkan tanggapan responden penelitian yang memberikan suara/memilih dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2010 di Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota. Berdasarkan hasil penelitian yang memberikan suara/memilih dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010 sebanyak 35 orang atau 35% dan responden yang tidak memberikan suara/memilih dalam Pemilu Kota Medan Tahun 2010 sebanyak 54 orang responden atau 54%, hal tersebut menggambarkan bahwa lebih banyak responden yang tidak memberikan

suara/memilih dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2010 yang lalu dengan berbagai alasan seperti tidak terdaftar dalam DPT, berhalangan hadir karena sakit atau ada urusan penting lainnya, tidak menyukai sosok, bahkan tidak mau tahu tentang Pilkada Kota Medan Tahun 2010 yang lalu.

Sumber Daya

Masalah sumber daya menjadi masalah yang cukup rumit dalam menjalankan implementasi pengawasan pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2010, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian menunjukkan pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT. Dapat diketahui pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT dengan jawaban tidak tahu sebanyak 48 orang atau 49,0%, pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT dengan jawaban tidak pernah di data sebanyak 35 orang responden atau 35,7%, kemudian pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT dengan jawaban Ya pernah di data, sebanyak 15 orang responden atau 15,3%. Hal tersebut menggambarkan pengetahuan responden mengenai petugas yang pernah mendata responden pada Pilkada Kota Medan Tahun 2010 agar terdaftar di DPT didominasi oleh responden yang tidak tahu dan tidak pernah di data oleh petugas, sedangkan responden yang pernah di data jumlahnya tidak signifikan.

Disposisi : Sikap Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian di atas terlihat kontras antara kenyataan dilapangan yaitu Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota banyak yang tidak menilai kinerja dan peran Panwaslu pada Pilkada Kota Medan dengan jawaban buruk dalam tahapan pilkada khususnya tahapan pemutakhiran data DPT, sementara wasil

wawancara menunjukkan Disposisi/kinerja Panwaslu sudah maksimal untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada Kota Medan khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih dan Daftar Pemilih Sementara/Daftar Pemilih Tetap.

Hal ini menggambarkan bahwa implementasi kalender pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) dalam Pilkada Kota Medan 2010 (studi kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota) berdasarkan teori Edward III dengan variabel disposisi/sikap pelaksana mengenai implementasi kebijakan belum berjalan maksimal

Struktur Organisasi

Kalender Pengawasan adalah jadwal atau agenda dalam tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada yang telah disusun sedemikian rupa oleh Bawaslu dan dilaksanakan oleh panitia pelaksanaan pengawas pemilu baik ditingkat Provinsi, maupun kabupaten/kota, yang meliputi antara lain kalender DPT, kalender pengawasan pencalonan, kalender pengawasan kampanye, kalender pengawasan dana kampanye, kalender pengawasan pergerakan surat suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Dalam tahapan kalender pengawasan mengenai kalender DPT, meliputi beberapa hal yang paling mendasar dalam pengawasan antara lain adalah ketentuan pemilih, pemutakhiran data/Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tambahan, Rekapitulasi jumlah pemilih, distribusi kartu pemilih, perubahan DPT, ketentuan pidana. Tetapi dalam penelitian ini di fokuskan hanya pada ketentuan pemilih dan pemutakhiran data/daftar pemilih yang bersesuaian dengan judul penelitian tesis.

Berdasarkan pada teori Edward III mengenai implementasi kebijakan menerangkan bahwa terdapat variabel pendukung berhasilnya implementasi yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi, Kaitannya dalam penelitian ini adalah Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun

2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) dengan mangacu kepada keberhasilan implementasi menurut acuan Edward III, maka dapat ditarik gambaran mengenai keberhasilan Implementasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (DPT) Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah sebagai berikut:

1. **Variabel Komunikasi**, belum berjalan maksimal
2. **Variabel Sumberdaya**, belum berjalan maksimal
3. **Variabel Disposisi**, belum berjalan maksimal
4. **Variabel Struktur birokrasi**, sudah berjalan maksimal

Faktor Penghambat Kinerja PaNwaslu dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Medan Tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan yang menjadi faktor penghambat kinerja Panwaslu dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Faktor rekrutmen/pembentukan Panwaslu
3. Faktor Keanggotaan, Pendidikan/Kapasitas,dan Anggaran.
4. Faktor terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan
5. Faktor ketidakmampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat yang disebabkan regulasi/undang-undang Bawaslu, Panwaslu
6. Rendahnya Partisipasi politik masyarakat kita masih sangat rendah.

Faktor Pendukung Kinerja Panwaslu dalam Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Medan Tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan yang menjadi faktor pendukung kinerja Panwaslu dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat menjalankan setiap tahapan-tahapan Pemilukada Kota Medan tahun 2010, terutama DPRD Kota Medan,BPS Kota Medan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Pemko Medan, (Kecamatan, Kelurahan, Kepala Lingkungan), mengenai pemutakhiran data pemilih, berangkat dari data BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta koordinasi dengan Pemko Medan untuk mendapatkan data yang terbaru.

Upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Medan dalam memaksimalkan peran dan fungsi tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Kota Medan tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa yang dilakukan Panwaslu Kota Medan dalam memaksimalkan peran dan fungsi dalam tahapan pemutakhiran Data Pemilih (DPT) Pemilu Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010 (Studi Kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Kota Medan) adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan khusus untuk masyarakat Tionghoa di Kelurahan Pusat Pasar tidak dilakukan hal demikian juga diberlakukan kepada masyarakat lainnya yang ada di Kota Medan (tidak ada perlakuan khusus).
2. Melakukan sosialisasi melalui spanduk, baliho, selebaran, iklan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Medan untuk mendaftarkan diri dan memberikan suara pada Pemilukada Kota Medan Tahun 2010.

3. Menggunakan waktu sebaik mungkin dalam setiap tahapan-tahapan Pemilukada Kota Medan dalam hal ini pada tahapan pemutakhiran Data Pemilih (DPT)
4. Memanfaatkan anggaran yang tersedia dengan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga setiap tahapan dalam Pemilukada Kota Medan tahun 2010 bisa berjalan sesuai dengan rencana.
5. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota Panwaslu Kota Medan guna memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tugas dan kewenangan panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Maka anggota Panwaslu Kota Medan melakukan Bimbingan teknis untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan se- Kota Medan yang berhubungan dengan peran pengawasan dan tata cara penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat.
 - b. Melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan instansi yang terkait (pihak Kepolisian dan Kejaksaan), merupakan suatu lembaga yang dibentuk guna menangani atau memeriksa dan melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terindikasi pelanggaran tindak pidana pemilukada.
 - c. Bekerja sama dengan BPS Kota Medan, Pemko Medan, Kecamatan, Kelurahan yang ada di Kota Medan agar mengajak masyarakat/berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar di DPT.dalam hal pemutakhiran data sampai pada DPT.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian serta pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan mengenai implementasi kalender pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) pada Pemilukada Kota Medan tahun 2010 (studi kasus Kelurahan Pusat Pasar Kecamatan Medan Kota, Kota Medan), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembahasan menggunakan teori implementasi kebijakan mengenai implementasi pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih (DPT) pada Pemilukada Kota Medan tahun 2010 belum berjalan maksimal dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan kinerja Panwaslu yang terbatas pada SDM, regulasi, dan waktu kerja.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kota Medan Tahun 2010, khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah terbatasnya anggota Panwas, terbatasnya waktu pembentukan (regulasi/UU yang mengatur Panwas/Bawaslu), SDM yang tidak sama (tingkat pendidikan) antara Panwas Kota, Kecamatan, dan Kelurahan sehingga anggota Panwas tidak mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik, keterbatasan anggaran.
3. Faktor pendukung pendukung yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kota Medan Tahun 2010, khususnya pada tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dukungan dari semua elemen masyarakat, DPRD Kota Medan, Instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, BPS Kota Medan, Pemko Medan (Kecamatan, Kelurahan, Kepling) yang membantu tahapan Pemilukada khususnya pemutakhiran data DPT.
4. Upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Medan Tahun 2010, khususnya pada

tahapan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), antara lain melakukan BIMTEK kepada seluruh anggota Pawas, membuat MOU dengan instansi kepolisian dan kejaksaan untuk tindak pidana dalam tahapan Pilkada, dan kerja sama dengan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPS Kota Medan dalam hal pemutakhiran data pemilih, serta kelurahan /kepling agar mengajak masyarakat/berpartisipasi mendaftarkan diri apabila tidak terdaftar di DPT.

Saran

Adapun saran/rekomendasi yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut:

1. Kepada DPR selaku pembuat Undang-Undang, terkait pada peraturan perundang-undangan yang ada selama ini yang mengatur Panwaslu/Bawaslu perlu ditinjau ulang, direvisi agar Panwaslu/Bawaslu memiliki kemampuan yang lebih tegas dalam menjalankan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada.
2. Perlu diperhatikan waktu masa kerja Panwaslu, mulai dari pembentukan, masa aktif kinerja, jumlah anggota Panwaslu, anggaran yang diberikan sehingga Panwaslu dapat bekerja maksimal dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada.
3. Dalam perekrutan anggota Panwaslu untuk tingkat Kelurahan/Desa perlu diperhatikan tingkat pendidikan calon, wawasan calon, agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Panwas sesuai dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang
4. Kepada KPU dan Panwaslu dalam menerapkan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada khususnya tahapan pemutakhiran data pemilih DCS dan DPT perlu diadakan MoU beserta garis kordinator yang jelas antara KPU, Panwaslu, serta instansi terkait seperti BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar data pemilih

didapat lebih update dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press
- Gie, The Liang (1962), *Kamus Administrasi*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta
- Grindle, Merilee S. 1980 *Local government in developmg countries*. New York
- Moloeng, Iexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Siagian, Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan. Ketujuh, Jakarta: Radar Jaya
- Thoha, Miftah, (2003), *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ukas Maman, (2004) *Controlling is the process managers* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta
- Varma, SP. 2001, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* Pustaka Pelajar. Jogjakarta.
- http://www.idea.int/publications/pub_electoral_main.html
- <http://www.bawaslu.go.id>
- <http://www.waspada.co.id>
- <http://www.forumkompas.com>
- <http://www.perludem.org>